

Faktor Kebudayaan dalam Teori Hubungan Internasional

Umar Suryadi Bakry

Abstract

This article tried to explain some thoughts on the importance of cultural factors in the study of International Relations (IR). As it is known that the mainstream theories of international relations since the end of the World War II has ignored the role of cultural factors in world politics. But, after the Cold War era in 1990s, culture began to enter the center of research on international relations. After the Cold War ended, cultural factors become particularly prominent, and began to gain more attention from the scholars of International Relations. There are at least three most prominent theories which are increasingly taking account the role of cultural factors in international, that is, Huntington's "clash of civilization" theory, Nye's "soft power" theory, and constructivism theory. In addition, since the 1990s, many studies conducted by IR scholars on the relationship between culture and foreign policy of a country. The emergence of international culturology as a sub-field of IR studies further confirmed that culture as an important variable in international relations.

Keywords: *cultural factor, international relations, international culturology, theory.*

Pendahuluan

HAMPIR semua *text-book* Hubungan Internasional (HI) yang terbit pada millennium ketiga pasti memberikan penekanan mengenai terjadinya perubahan fundamental dalam politik global pasca Perang Dingin. Perubahan fundamental tersebut tidak dapat disangkal lagi memiliki pengaruh besar terhadap eksistensi studi HI. Teori-teori baru bermunculan menentang atau sekedar mengkritik teori-teori arus utama (*mainstream theories*). Tema-tema baru mendapatkan perhatian serius dari para sarjana HI menggantikan tema-tema lama yang lebih menekankan pada isu-isu politik dan keamanan tradisional. Salah satu tema baru yang mulai mendapatkan perhatian dari para sarjana dan teoritis HI adalah isu kebudayaan (*culture*). Sebagaimana dikatakan Zu Majie, dalam konfigurasi dunia baru pasca Perang Dingin, faktor kebudayaan menjadi sangat menonjol¹, dan mulai memperoleh perhatian dari para teoritis HI.

Sebagaimana diketahui, sejak Perang Dunia II Amerika Serikat (AS) telah mendominasi dan mengontrol teori dan penelitian tentang hubungan internasional. Perdebatan antara tiga aliran utama, yaitu realisme, liberalisme, dan strukturalisme telah mewarnai studi HI selama beberapa dekade dan perdebatan mereka selalu berkisar pada

¹ Zhu Majie. 2002. "Contemporary Culture and International Relations", dalam Yu Xiantian, *Cultural Impact on International Relations*. Washington, DC: The Council for Research in Values and Philosophy, hal. 23-38.

aspek kekuasaan. Dalam perdebatan awal antara idealisme versus realisme, misalnya, fokus penelitian hubungan internasional adalah power, kepentingan, keamanan, strategi, hegemoni, dan tata internasional. Dalam perdebatan antara neorealisme dan neoliberalisme, muncul konsep-konsep baru seperti interdependensi, konflik, dan kerjasama.

Memang selama Perang Dingin sudah ada beberapa sarjana yang menggunakan istilah-istilah yang mengandung faktor budaya seperti ‘moral’, ‘ideal’, ‘humanity’, dan ‘ideologi’ dalam teori-teori mereka. Namun penggunaan kata-kata ini masih sangat marjinal, serta subordinat terhadap konsep *power* dan *national interest* yang cenderung bersifat material. Hingga 1980-an, teori HI arus utama telah memiliki banyak pencapaian penting dan memiliki jangkauan pengaruh yang luas, tetapi ketidakpedulian terhadap penelitian budaya telah menjadi kelemahannya yang paling fatal. Menurut Jongsuk Chay, dimensi budaya merupakan salah satu topik yang paling ditelantarkan dalam bidang studi HI.²

Menurut Yu Xintian, dengan adanya revolusi teknologi dan globalisasi dalam segala bidang, intensitas hubungan antar negara di dunia telah mengalami peningkatan yang tak pernah terjadi sebelumnya. Berakhirnya Perang Dingin juga telah mengakhiri permusuhan antara dua kubu di dunia dan memperkenalkan cara-cara baru dalam hubungan antar negara. Dalam tiga dekade terakhir, studi HI telah menjadi disiplin yang paling cepat berubah, paling maju, dan paling menarik. Teori-teori HI arus utama telah mengalami perubahan cepat, yang semula mengabaikan peran budaya kini memberikan perhatian yang sangat besar pada penelitian-penelitian mengenai budaya dalam politik dunia. Bahkan lebih maju lagi, beberapa teori HI kontemporer telah mengajukan proposisi bahwa budaya membentuk hubungan internasional (*culture constructing international relations*).³ Artikel ini berusaha memaparkan sejumlah pemikiran tentang pentingnya faktor kebudayaan dalam studi HI.

Definisi dan Hakekat Kebudayaan

Tidak ada definisi yang diterima umum mengenai kebudayaan (*culture*). Stuart Hall bahkan mengatakan, kebudayaan merupakan salah satu konsep yang paling sulit dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Berbeda sarjana membuat definisi dan konotasi yang berbeda mengenai kebudayaan. Ahli antropologi dari Inggris Edward Tyler, misalnya, menulis bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni,

² Jongsuk Chay. 2016. Sebagaimana dikutip Mary Einbinder, “*Cultural Diplomacy: Harmonizing International Relations through Music*”, dalam <http://www.culturaldiplomacy.org/pdf/case-studies/> [Diakses 24 Oktober 2016].

³ Yu Xintian. 2004. *Cultural Factors in International Relations*. Shanghai: Shanghai Institute of International Studies, hal. 18-19.

hukum, moral, adat, serta setiap kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.⁴ Sedangkan ahli antropologi terkemuka lainnya, James Spradley mendefinisikan kebudayaan adalah pengetahuan yang diperoleh masyarakat yang digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan menghasilkan tingkah laku.⁵ Guru besar antropologi Universitas Indonesia, Parsudi Suparlan, memahami kebudayaan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi landasan bagi perilakunya.⁶

Stuart Hall berpendapat bahwa kebudayaan adalah “sebuah proses, serangkaian praktik. Kebudayaan terutama berkaitan dengan produksi dan pertukaran makna –saling memberi dan menerima makna antar anggota masyarakat atau kelompok. Jadi kebudayaan tergantung pada bagaimana partisipannya menafsirkan makna apa yang ada di sekitar mereka, dan membuat pemahaman mengenai dunia dengan cara-cara yang sama”.⁷ Definisi Hall ini menekankan mengenai pentingnya praktik-praktik sosial yang terkandung dalam konsep kebudayaan. Ia mengacu pada struktur makna budaya (*cultural meanings structure*) dan mengendalikan interaksi sosial di setiap bidang pengalaman, dari yang sangat umum sampai yang sangat pribadi. Hall melihat makna diproduksi dan dipertukarkan dalam berbagai cara, diantaranya: (1) identitas kelompok dan perbedaan kelompok; (2) interaksi personal dan sosial; (3) media massa dan komunikasi-komunikasi global; (4) ritual-ritual dan praktik-praktik kehidupan sehari-hari; (5) narasi-narasi, cerita-cerita, dan fantasi-fantasi; dan (6) aturan-aturan, norma-norma, dan konvensi-konvensi.

Alfred Kroeber dan Clyde Kluckhohn sebagaimana dikutip Nancy Adler mengatakan bahwa kebudayaan terdiri dari pola-pola (yang eksplisit maupun implisit) dari dan untuk perilaku yang diperoleh dan ditularkan melalui simbol-simbol, yang merupakan pencapaian tersendiri dari kelompok-kelompok manusia, termasuk perwujudan mereka dalam artefak. Inti penting dari kebudayaan terdiri dari gagasan-gagasan tradisional (yaitu secara historis diturunkan dan diseleksi) dan terutama nilai-nilai yang melekat pada mereka. Sistem kebudayaan di satu sisi dapat dianggap sebagai produk dari tindakan, di sisi lain sebagai unsur-unsur kondisional mengenai tindakan di masa depan.⁸

⁴ Edward B. Tyler. 2013. Sebagaimana dikutip Roy Ellen, Stephen J. Lycett, dan Sarah E. Johns (eds.), *Understanding Cultural Transmission in Anthropology: A Critical Synthesis*. London: Berghahn Books, hal. 80.

⁵ James P. Spradley. 2004. *Culture and Cognition: Rules, Maps, and Plans*. San Marcos, PI: Chandler Pub. Co.

⁶ Parsudi Suparlan. 2004. *Hubungan Antar Suku-Bangsa*. Jakarta: YPKIP.

⁷ Stuart Hall (ed.). 2003. *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London: SAGE Publications, hal. 2.

⁸ Nancy J. Adler. 2008. *International Dimensions of Organizational Behavior*. USA: Thomson Learning, Inc., hal. 18.

Menurut Zhang Hongyan, konsep kebudayaan dapat diklasifikasikan dalam arti luas (*in a broad sense*) dan dalam arti sempit (*in a narrow sense*). Dalam arti luas, kebudayaan adalah *sepecial way of life* dari eksistensi manusia yang bersifat beragam. Dalam keberagaman itulah manusia hidup. Kebudayaan adalah dasar mengapa manusia menjadi manusia dan kebudayaan membuat manusia lebih sempurna dan semakin sempurna. Dalam arti sempit, kebudayaan merupakan sintesis dari pengetahuan, keyakinan, moral, dan norma. Kebudayaan tidak hanya eksis namun juga muncul dalam bentuk ideologi, temuan akademik, sastra dan seni, serta menyebar melalui berbagai bentuk media.⁹

Helen Spencer-Oatey menyebutkan 12 karakteristik kunci dari kebudayaan, yaitu: (1) Kebudayaan dimanifestasikan pada lapisan-lapisan yang berbeda dari kedalaman; (2) Kebudayaan mempengaruhi perilaku dan interpretasi mengenai perilaku; (3) Kebudayaan dapat dibedakan dari kedua sifat manusia yang universal dan kepribadian individu yang unik; (4) Kebudayaan mempengaruhi proses-proses biologis; (5) Kebudayaan terkait dengan kelompok-kelompok sosial; (6) Kebudayaan merupakan konstruksi individu maupun konstruksi sosial; (7) Kebudayaan secara sosial dan secara psikologis selalu didistribusikan dalam sebuah kelompok, dan penggambaran fitur kebudayaan selalu tidak jelas; (8) Kebudayaan memiliki elemen universal (etik) maupun elemen yang khas (emik); (9) Kebudayaan dipelajari; (10) Kebudayaan tunduk pada perubahan secara bertahap; (11) Berbagai bagian dari kebudayaan saling terkait; dan (12) Kebudayaan merupakan sebuah konsep deskriptif, bukan konsep evaluatif.¹⁰

Mengenai jenis-jenis kebudayaan (*types of culture*) juga tidak ada kesamaan pandangan di antara para ahli kebudayaan. Ahli sosiologi Perancis, Claude Levi-Strauss, mengidentifikasi dua jenis kebudayaan: kebudayaan “panas” dan kebudayaan “dingin”. Kebudayaan dingin (“*old culture*”) adalah sesuatu yang berfungsi seperti jam tangan mekanis. Di dalamnya ada sebuah kesadaran tradisi sebagai sesuatu yang statis, yang berarti ada kehendak untuk mencegah setiap perubahan. Segala sesuatu berulang tanpa henti. Di lain pihak, kebudayaan panas (“*hot culture*”) berfungsi seperti mesin uap. Menurut prinsip termodinamika, bahwa kebudayaan panas mempertimbangkan perubahan sebagai hal biasa.¹¹

Stanley Knick menyebut dua jenis kebudayaan, yaitu kebudayaan tradisional dan kebudayaan modern. Kebudayaan tradisional (*traditional culture*) adalah kebudayaan seperti

⁹ Zhang Hongyan. 1993. *Ethnic and Culture Prejudice: New Views on Comparison between Chinese and Western Cultures*. Liaoning: Liaoning Education Publishing House, hal. 21.

¹⁰ Helen Spencer-Oatey. 2016. “*What is Culture?*”, dalam <https://www2.warwick.ac.uk/globalpadintercultural> [Diakses 4 Oktober 2016].

¹¹ Claude Levi-Strauss. 2009. Sebagaimana dikutip David Simo, “*Modern and Traditional Cultures*”, dalam Herbert Arlt dan Donald G. Daviau (eds.), *Culture, Civilization, and Human Society*. Oxford: Eolss Publishers Co., Ltd.

yang dinikmati oleh nenek moyang kita, yang diselenggarakan bersama oleh hubungan antara masyarakat manusia (seperti keluarga dekat, keluarga luas, klan, atau suku). Semua orang tinggal di dekatnya. Sementara kebudayaan modern (*modern culture*) berkembang di berbagai tempat di planet bumi karena masyarakat manusia tumbuh semakin besar. Organisasi massal dalam beberapa bentuk, merupakan kekuatan penting yang mengubah kebudayaan tradisional menjadi modern. Pergeseran dari kehidupan perdesaan menuju kehidupan perkotaan merupakan inti dari berkembangnya kebudayaan modern.¹² Menurut David Simo, karakteristik kebudayaan panas dan kebudayaan dingin sebagaimana diidentifikasi oleh Levi-Strauss, persis seperti kebudayaan modern dan kebudayaan tradisional sebagaimana yang dimaksudkan Knick.

Pakar lain membagi kebudayaan menjadi kebudayaan material (*material culture*) dan kebudayaan non-material (*non-material culture*). Kebudayaan material mengacu pada obyek fisik, sumber daya, dan ruang yang digunakan orang untuk mendefinisikan kebudayaan mereka. Ini termasuk rumah, lingkungan, kota, sekolah, gereja, sinagog, kuil, masjid, kantor, pabrik dan tanaman, alat-alat, alat-alat produksi, barang dan produk, toko, dan sebagainya. Semua aspek-aspek fisik dari kebudayaan membantu untuk menentukan perilaku dan persepsi anggotanya. Sedangkan kebudayaan non-material berasal dari hal-hal yang tak berwujud. Kebudayaan non-material termasuk kreasi dan ide-ide abstrak yang tidak diwujudkan dalam benda-benda fisik. Dengan kata lain, setiap produk yang tidak berwujud dibuat dan dibagi diantara anggota suatu budaya dari waktu ke waktu adalah aspek kebudayaan non-material mereka. Contoh kebudayaan non-material adalah keyakinan (*beliefs*), tradisi (*traditions*), dan nilai-nilai (*values*), aturan (*rules*), etika (*ethics*), bahasa (*languages*), moral (*morals*), peran sosial (*social roles*), dan sebagainya.¹³

Selain kebudayaan material dan non-material, ada jenis kebudayaan yang kurang dominan, yang disebut dengan subkultur (*subculture*) dan kebudayaan tandingan (*counterculture*). Subkultur mengacu pada sekelompok orang yang memegang keyakinan yang berbeda atau berperilaku berbeda daripada mayoritas orang di komunitas mereka. Anggota subkultur juga sering membuat bahasa yang berbeda dari mayoritas. Akibatnya, masyarakat kecil ini membentuk budaya yang dapat mengucilkan mereka dari keseluruhan masyarakat. Kebudayaan tandingan adalah gerakan untuk secara aktif menentang satu atau lebih aspek budaya yang dominan. Contoh kelompok tandingan meliputi Ku Klux Klan,

¹² Stanley Knick. 2016. "Traditional Culture and Modern Culture: Man's Fall From Grace", dalam http://www.huffingtonpost.com/stanley-knick/traditional-culture-and-m_b_655992.html [Diakses 5 Oktober 2016].

¹³ David M. Newman. 2010. *Sociology: Exploring the Architecture of Everyday Life*. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press, hal. 45.

anggota gerakan hippie dan kelompok-kelompok militan yang memprotes kontrol pemerintah.¹⁴

Kebudayaan dan Hubungan Internasional

Setelah 1980-an, teori kritis (*critical theory*), termasuk postmodernisme, feminisme, dan konstruktivisme, hadir di lingkungan studi HI dan terutama setelah 1990-an keberadaan teori-teori tersebut semakin berkembang. Sejak saat itu konsep 'kebudayaan' mulai memasuki dunia penelitian hubungan internasional. Sedari awal teori kritis mengarahkan tombaknya pada inti dari teori-teori tradisional, yaitu keseluruhan pemikiran Barat yang didasarkan pada konsep-konsep pokok. Teori kritis bertugas untuk membebaskan isu-isu yang sejak awal dilupakan dan dibatasi. Teori-teori tradisional hampir semua ilmu pengetahuan (termasuk studi HI) meyakini bahwa pengetahuan bebas dari pengaruh power (*knowledge was free from the influence of power*). Namun postmodernisme menunjukkan bahwa power menciptakan pengetahuan (*power created knowledge*), ada interkoneksi antara 'mereka' dengan 'pengetahuan'.¹⁵ Teori kritis hadir memecahkan cara berfikir baku dari teori-teori arus utama dan memperkenalkan konsideransi baru dengan membawa cahaya terhadap ilmu pengetahuan yang mengabaikan faktor-faktor sosial dan budaya.

Dengan adanya serangan dari teori kritis dan terutama adanya tantangan dari perubahan-perubahan drastis dalam realitas hubungan internasional pasca Perang Dingin, teori-teori hubungan internasional arus utama mulai memalingkan perhatiannya pada aspek-aspek peradaban dan kebudayaan. Sedikitnya ada tiga teori yang paling menonjol yang memberikan perhatian yang memadai terhadap aspek-aspek peradaban dan kebudayaan, yaitu teori benturan peradaban (*clash of civilization theory*), teori *soft power* (*soft power theory*), dan teori konstruktivisme (*constructivism theory*).

Teori benturan peradaban diperkenalkan oleh Samuel Huntington melalui bukunya yang berjudul *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* (1996). Teori ini banyak memperoleh komentar dari berbagai sarjana di seluruh dunia dan menimbulkan kontroversi yang berlangsung hingga hari ini. Inti dari teori benturan peradaban Huntington adalah: *Pertama*, ia meyakini bahwa dalam dunia pasca Perang Dingin, hubungan internasional telah menjadi multi-polar dan multi-budaya untuk pertama kalinya dalam sejarah. Peradaban Barat memang unik, namun tidak universal. Dunia dengan pluralisme budaya tidak dapat dihindarkan, karena tidak mungkin membangun sebuah imperium global.

¹⁴ Joan Ferrante. 2008. *Sociology: A Global Perspectives*. USA: Thomson Wadsworth, hal. 79.

¹⁵ Yu Xintian. 2004. "Combining Research on Cultural Theory and International Relations", dalam Yu Xiantian (ed.), *Cultural Factors in International Relations*. Washington, DC: Cardinal Station, hal. 10.

Menjaga keamanan dunia memerlukan penerimaan terhadap diversitas budaya global. *Kedua*, negara-bangsa adalah (dan akan) menjadi faktor paling penting dalam masalah-masalah dunia, namun kepentingan, aliansi, dan konflik di antara mereka semakin dipengaruhi oleh faktor-faktor peradaban dan kebudayaan.¹⁶

Meskipun menunjukkan adanya pengakuan mengenai pentingnya faktor kebudayaan dalam hubungan internasional, tetapi pada dasarnya cara berfikir Huntington belum terbebas dari mentalitas Perang Dingin. Dalam terminologi Huntington, politik regional adalah politik rasial, politik global adalah politik peradaban, dan benturan peradaban menggantikan persaingan antara super power. Pada esensinya, menurut Huntington, benturan peradaban merupakan pergulatan antara peradaban Barat yang seragam dengan peradaban-peradaban lain. Kendati masih menimbulkan kontroversi, teori benturan peradaban Huntington tetap penting karena telah mengakui keragaman budaya dunia dan peran yang luar biasa dari faktor kebudayaan dalam teori hubungan internasional.

Teori "*soft power*" dari Joseph Nye juga membangkitkan minat para sarjana HI mengenai pentingnya faktor kebudayaan dan peradaban. Nye menetapkan standar nilai, ekonomi pasar, dan peradaban Barat sebagai faktor-faktor dari "*soft power*" sehingga menjadi relatif terhadap "*hard power*" kekuatan militer. *Pertama*, ia menegaskan bahwa faktor budaya dan ekonomi memainkan peran yang semakin besar dalam hubungan internasional dan hakikat "*soft power*" tidak dapat dijelaskan dan dinilai secara geopolitik. *Kedua*, "*soft power*" menjadi faktor yang tak dapat dihindari, membuat semua negara mengikuti dengan sepenuh hati atau terpaksa mengikuti. Sampai batas tertentu, efektivitas "*soft power*" lebih dari "*hard power*".¹⁷ Pada akhirnya "*soft power*" dan "*hard power*" lebih bersifat komplementer daripada bertentangan.

Lebih dari itu, teori "*soft power*" telah memperkenalkan pemahaman mengenai peranan budaya dan menjadi titik pertumbuhan baru dalam penelitian tentang hubungan internasional. Menurut Zhu Majie, "*soft power*" merupakan komponen penting terkait dengan kompetisi antar negara dan memainkan peran yang terus meningkat dalam evolusi hubungan internasional. Kebudayaan sebagai salah satu jenis dari "*soft power*" bahkan memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap hubungan internasional. Sebab itu, sekarang

¹⁶ Samuel P. Huntington. 1997. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New Delhi: Penguin Books.

¹⁷ Joseph Nye. 1992. *Bound to Lead: The Changing Nature of American Power*. New York: Military Transition Press, hal. 25.

ini hal yang lumrah bagi sebagian besar negara memfokuskan diri pada kekuatan kebudayaan (*the power of culture*) dalam kompetisi internasional di berbagai bidang.¹⁸

Teori lainnya dalam studi HI yang menaruh perhatian terhadap isu kebudayaan adalah konstruktivisme. Alexander Wendt dalam karyanya *Social Theory of International Politics* (1999) mengemukakan empat proposisi mengenai hubungan antara kebudayaan dan hubungan internasional.¹⁹ *Pertama*, bahwa negara, sistem negara, dan struktur-struktur sosial lainnya secara obyektif sebagai sesuatu yang eksis dan merupakan fenomena sosial kolektif, di mana individu-individu yang ada di dalamnya tidak dapat mengubahnya menjadi konsep subyektif. Namun masyarakat dan dunia dibangun melalui praktik-praktik para individu. *Kedua*, konsep-konsep sosial membangun struktur dari sistem internasional dan dipercaya sebagai kekuatan yang mengendalikan (*driving force*) struktur tersebut. Neorealisme dan neoliberalisme menekankan bahwa *power* dan *interest* merupakan kekuatan yang mengendalikan politik internasional, sedangkan konsep-konsep bersama (*common concepts*) kurang begitu penting. Tetapi Wendt meyakini bahwa peran paling penting dari konsep-konsep bersama terhadap politik internasional lebih bersifat konstruksional daripada kausal, struktur internasional lebih merupakan fenomena sosial daripada material.

Ketiga, Wendt tidak sepatutnya dengan proposisi realisme yang mengatakan bahwa negara-negara adalah bentuk dari penyelamatan diri (*self-help*) dan bersaing satu sama lain. Wendt merujuk pada tiga kebudayaan anarkhis (*anarchic cultures*), yakni kebudayaan Hobbesian, kebudayaan Lockean, dan kebudayaan Kantian. Dalam kebudayaan Hobbesian (*Hobbesian culture*), orientasi timbal balik antar negara adalah musuh. Dalam kebudayaan Lockean (*Lockean culture*), orientasi timbal balik antar negara merupakan pesaing. Sedangkan dalam kebudayaan Kantian (*Kantian culture*), orientasi timbal balik antar negara justru sebagai teman. Menurut Wendt, konsep bersama dan kebudayaan yang berbeda dapat mengkonstruksi jenis anarkhi yang berbeda. *Keempat*, meskipun perubahan konsep-konsep bersama dapat menyebabkan hubungan internasional yang berbeda, tidak berarti bahwa perubahan itu mudah, karena tidak mudah bagi suatu negara atau bahkan beberapa negara mengubah sistem kebudayaannya. Negara-negara besar memiliki kekuatan dan sulit dibatasi oleh lingkungan yang dibakukan (*standardized environment*), sehingga mereka mempunyai kemampuan menginovasi kebudayaan.

¹⁸ Zhu Majie. 2002. "The Role of Soft Power in International Relations", dalam Yu Xintian, *Cultural Impact on International Relations*. Washington, DC: The Council for Research in Values and Philosophy, hal. 41.

¹⁹ Alexander Wendt. 1999. *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Menurut Thomas Diez (*et al*), argumen-argumen utama konstruktivisme dalam Hubungan Internasional dapat diringkas sebagai berikut: *Pertama*, struktur dan agen internasional adalah saling membentuk. *Kedua*, norma-norma dan institusi-institusi merupakan hal penting dalam hubungan internasional. *Ketiga*, identitas dan kebudayaan merupakan faktor penting dalam memahami kebijakan. *Keempat*, kepentingan perlu dipahami dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain.²⁰

Dalam pandangan kaum konstruktivis, identitas dan kebudayaan merupakan kategori-kategori yang sangat relevan (*highly relevant*) untuk memahami hubungan internasional kontemporer, khususnya hubungan internasional pasca berakhirnya Perang Dingin. Terutama jika dikaitkan dengan argumen pertama (struktur dan agen yang saling membentuk), kebudayaan dan identitas merupakan bagian dari konteks di mana para aktor berada. Di sisi ini berarti bahwa kebudayaan dan identitas (*culture and identity*) menjadi faktor inti dalam memahami hubungan-hubungan dan kebijakan-kebijakan dalam level internasional. Di sisi lain, setiap kerjasama dalam sebuah level internasional perlu memperhitungkan pemahaman dan rasionalitas yang berbeda-beda. Dalam pandangan konstruktivisme, kebudayaan dan identitas bukan merupakan sesuatu yang bersifat *given* dan statis, melainkan terus berubah.²¹

Mengenai bagaimana kebudayaan mempengaruhi hubungan internasional, Zhu Majie menawarkan empat model sebagai berikut. *Pertama*, kebudayaan memiliki dampak yang sangat luas terhadap pencapaian (*achievements*) dari suatu negara. Kebudayaan memainkan peran penting dalam memberikan kondisi spiritual, etika dan ekonomi bagi kehidupan manusia dalam hubungan antar bangsa. *Kedua*, kebudayaan merupakan navigator dalam membuat keputusan. Beberapa orang melihat kebudayaan sebagai analog dengan filter pengetahuan. *Ketiga*, kebudayaan adalah desainer dari struktur sosial dan ekonomi. *Keempat*, kebudayaan merupakan variabel penting dalam hubungan internasional. *Kelima*, sifat kesamaan dan saling melengkapi dari kebudayaan memberikan dasar penting bagi keharmonisan dalam hubungan internasional. Kebudayaan juga dapat disebut sebagai penguat hubungan internasional.²²

Menurut Zhu Majie, sejak berakhirnya Perang Dingin, peranan kebudayaan dalam hubungan internasional telah berkembang pesat, diantaranya dimanifestasikan dalam aspek-

²⁰ Thomas Diez, Ingvild Bode, and Aleksandra Fernandes da Costa. 2011. *Key Concepts in International Relations*. London: SAGE Publication Ltd., hal. 210-213.

²¹ *Ibid*, hal. 212.

²² Zhu Majie. 2002. "Contemporary Culture and International Relations", dalam Xintian Yu, *Cultural Impact on International Relations*. Washington, DC: The Council for Research in Values and Philosophy, hal. 23-38

aspek sebagai berikut: (1) Semakin diterimanya diplomasi HAM atau *humanitarian diplomacy* dalam praktik hubungan antar negara; (2) Pengekangan institusi-institusi internasional; (3) Intervensionisme baru yang diimplementasikan melalui sarana militer; (4) sumber daya untuk kekuatan komoditas; (5) Memperkuat ekspansi budaya.

Ada cara lain yang sangat penting di mana kebudayaan membentuk masalah-masalah internasional. Secara historis, kebudayaan itu sendiri telah menjawab bahwa ada semacam 'sistem dunia' (*world-system*) atau 'masyarakat dunia' (*world society*), dan mendukung gagasan menjangkau dunia yang lebih luas. Masyarakat yang berbeda memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai bagaimana model dari dunia ini harus dikonstruksi. Misalnya, dalam kekaisaran China kuno, berkembang sebuah sistem mengenai hubungan internasional Asia yang didasarkan yang didasarkan atas sistem upeti (*tribute system*), yang terdiri dari daerah inti yang beradab, yang dikelilingi oleh negara-negara pinggir yang terikat melalui upeti, kemudian suatu kawasan 'liar' yang semakin jauh. Dalam Kristendom Barat tradisional, sebuah komunitas bangsa-bangsa Kristen dipandang sebagai basis hukum internasional dan komunitas nyata, sementara negara di luar Eropa hanya yang dianggap cocok saja yang bisa bergabung dan diterima sebagai bagian dari komunitas 'beradab' ini.²³ Dalam sejarah Islam juga dikenal konsep zona damai (*Dar al-Islam*) yang dikelilingi oleh wilayah-wilayah yang berpotensi bermusuhan (*Dar al-Harb*). Baik peradaban Islam maupun Kristen sama-sama punya kecenderungan universal, berusaha untuk menjangkau semua umat manusia di seluruh dunia.

Kebudayaan dan Politik Luar Negeri

Kebudayaan memberikan orang cara berpikir, melihat, dan menafsirkan dunia. Orang-orang dari kebudayaan yang berbeda pasti akan memiliki cara yang berbeda dalam memandang dunia, sehingga dalam situasi di mana komunikasi lintas budaya yang lazim, seperti pembuatan kebijakan luar negeri, akan selalu ada potensi bentrokan dan konflik. Secara konvensional, politik luar negeri ditentukan oleh faktor ekonomi dan strategis (geoekonomi dan geopolitik). Namun tanpa memperhitungkan faktor lain yang membentuk arus bawah dari proses pembuatan kebijakan luar negeri, kita tidak akan dapat membuat sebuah eksplanasi yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang menentukan politik luar negeri suatu negara. Faktor lain itulah yang dimaksud dengan faktor kebudayaan.

²³ *Ibid*, hal. 20

James Ferguson menegaskan bahwa kebudayaan merupakan elemen penting yang mempengaruhi politik luar negeri (*foreign policy*) suatu negara. Ia mengutip pendapat Valerie Hudson yang mengatakan bahwa kebudayaan mempengaruhi politik luar negeri terutama melalui cara para aktor mencapai keputusan dalam masalah-masalah luar negeri, khususnya selama masa krisis. Selain karakteristik individu dan psikologi, serta struktur politik pemerintahan, sering diasumsikan bahwa individu-individu dalam beberapa derajat dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan dalam masyarakat mereka, pengalaman sejarah mereka, sistem nilai, dan struktur bahasa mereka.²⁴

Mengenai pengaruh kebudayaan terhadap politik luar negeri, Valerie Hudson mengemukakan sejumlah pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana perbedaan budaya membawa bangsa-bangsa menuju pada pola-pola interaksi yang dapat diprediksi? Dalam kondisi apa kebudayaan dapat memainkan peran lebih penting dalam interaksi internasional? Apakah sindrom-sindrom budaya menyebabkan pada kecenderungan, reaksi dan tindakan yang dapat diprediksi? Apakah perlindungan identitas dan kebudayaan nasional merupakan inti dari kepentingan nasional? Apakah yang dimaksud dengan dinamika perubahan kebudayaan dan bagaimana hal ini dapat dikur, termasuk dampaknya terhadap politik luar negeri?²⁵

Dalam praktik hubungan internasional, sejak 1920-an pemerintah berbagai negara sering mencoba menggunakan kebudayaan dalam urusan-urusan luar negeri. Mereka memperkenalkan bahasa, musik, media, dan pandangan luar negeri mereka sendiri (sering disebut sebagai promosi '*high culture*'). Dengan demikian diakui bahwa ada perbatasan budaya (*cultural borderlands*) dimana kebudayaan yang berbeda berinteraksi dan mulai dipopulerkannya diplomasi kebudayaan (*cultural diplomacy*). Perancis dan Inggris, misalnya, telah lama melakukan promosi bahasa dan budaya mereka sebagai bagian dari *nation-to-nation diplomacy*, diantaranya melalui Centre Culturel Français dan British Council di berbagai negara. Demikian juga Turki, telah berusaha meraih keuntungan dari posisinya sebagai batas kebudayaan antara Barat dan Asia, dengan mencoba memanfaatkan akses menuju perdagangan dan teknologi Eropa. Di lain pihak, Turki juga berusaha mengambil keuntungan dari adanya koneksi budaya dengan negara-negara berbahasa Turki di sejumlah negara Asia Tengah (suatu kawasan budaya yang sering disebut sebagai Turkistan).

²⁴ James Ferguson. 2016. "*The Controversial Role of Culture in International Relations*", dalam <http://www.international-relations.com/wbadvir/wbadvir4.htm> [Diakses 7 Oktober 2016].

²⁵ Valerie M. Hudson. 1997. *Culture and Foreign Policy*. Boulder: Lynne Rienner, hal. 18.

Konsep *cultural diplomacy* untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri, selain melalui promosi budaya (*cultural promotion*) juga bisa diterapkan melalui pertukaran budaya (*cultural exchange*). Jepang, misalnya, sejak dekade 1980-an mulai mengandalkan pertukaran budaya sebagai salah satu dari tiga pilar politik luar negerinya (dua lainnya adalah keamanan dan ekonomi), sebuah *trend* yang pertama kali dikembangkan oleh PM Noboru Takeshita. Salah satu elemen kunci dari kegiatan pertukaran budaya adalah promosi acara-acara budaya Jepang di luar negeri, dan program ekstensif pertukaran pelajar telah memungkinkan mahasiswa asing untuk memasuki dan mengenal kebudayaan Jepang dalam jumlah besar dan dalam waktu cukup lama.²⁶

Konsep *cultural diplomacy* secara positif juga telah dimanfaatkan oleh organisasi-organisasi internasional untuk mengembangkan internasionalisme budaya maupun sekedar sebagai pendekatan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. ASEAN, sebagai contoh, telah mengembangkan apa yang disebut sebagai *ASEAN Way* sebagai sebuah gaya diplomasi yang khas yang membedakan ASEAN dengan organisasi-organisasi regional lainnya. Melalui *ASEAN Way*, para pemimpin ASEAN telah berhasil mempromosikan sebuah sistem berbasis konsensus dalam hubungan antar negara berdasarkan prinsip non-intervensi. Gagasan *ASEAN Way* ini juga telah mendorong berbagai gaya diplomasi dan praktik bisnis tertentu, setidaknya di antara para elit di Asia Tenggara. ASEAN telah memberi contoh pada dunia bagaimana perdagangan, pola-pola budaya, dan dialog dapat bercampur untuk membuat sebuah organisasi internasional yang sukses.²⁷

Akira Iriye juga mengakui bahwa kebudayaan merupakan elemen penting yang mempengaruhi politik luar negeri. Namun, pada tingkat yang lebih dalam, kita dapat juga berpendapat bahwa hubungan internasional itu sendiri dalam arti luas merupakan produk interaksi dari kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Dalam hal ini, hubungan internasional juga merupakan fenomena budaya dan intelektual.²⁸ Ide-ide yang mengubah perang menjadi damai, misalnya, merupakan contoh nyata bahwa hubungan internasional merupakan fenomena intelektual sekaligus fenomena budaya. Iriye juga berpendapat bahwa imajinasi kaum internasionalis telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam sejarah dunia modern, misalnya visi yang dibutuhkan untuk menciptakan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta ratusan organisasi internasional yang beragam

²⁶ Akira Iriye. 1997. *Cultural Internationalism and World Order*. New York: John Hopkins University Press, hal. 167.

²⁷ Rosita Dellios dan James Ferguson. 1997. "Australia and ASEAN: Submission to the Foreign Affairs Subcommittee". *ASEAN Enquiry*, Vol. 1, hal. 95-121.

²⁸ Akira Iriye, *loc. cit.*

(IGO dan INGO yang telah memainkan peran internasional yang beragam.²⁹ Ini semua adalah produk kebudayaan modern.

Pada era pasca Perang Dingin, telah banyak studi dilakukan oleh para sarjana mengenai hubungan antara kebudayaan dengan politik luar negeri. Kadira Pethiyagoda, misalnya, meneliti pengaruh nilai-nilai budaya dominan (*dominant cultural values*) terhadap politik luar negeri India. Penelitian ini memusatkan perhatian pada nilai-nilai budaya seperti non-kekerasan (*non-violence*), hierarki, pluralisme, dan toleransi. Hasil dari penelitian Pethiyagoda menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan luar negeri secara keseluruhan, terutama pendekatan India mengenai *humanitarian intervention*, kebijakan nuklir, konsepsi tentang kedaulatan, dan sebagainya.³⁰

Deon Geldenhuys mengkaji pengaruh kebudayaan politik dalam politik luar negeri Afrika Selatan. Hasil penelitian Geldenhuys menunjukkan bahwa berbagai elemen dari kebudayaan politik (khususnya nilai-nilai, norma, keyakinan, ekspektasi dan sikap) mempengaruhi politik luar negeri Afrika Selatan, seperti promosi mengenai demokrasi dan HAM di luar negeri, gagasan kedaulatan sebagai tanggung jawab (*sovereignty as responsibility*), solidaritas pembebasan, *global good citizenship*.³¹

Masih banyak penelitian lainnya mengenai hubungan antara kebudayaan, diantaranya yang dilakukan oleh Rachael Maxwell yang meneliti posisi seni dan kebudayaan dalam politik luar negeri Kanada. Kemudian Wang Zaibang melakukan penelitian pengaruh kebudayaan tradisional terhadap politik luar negeri China. Qin Yaqing mengkaji implikasi dari kebudayaan China terhadap pembuatan kebijakan luar negeri negara tersebut. Sedangkan Frode Liland mengembangkan tiga model pendekatan mengenai hubungan kebudayaan dengan politik luar negeri suatu negara, yaitu: (1) kebudayaan sebagai fundasi dari politik luar negeri; (2) kebudayaan sebagai bagian dari politik luar negeri; dan (3) kebudayaan sebagai sumber kebijakan luar negeri.³²

²⁹ Akira Iriye, *ibid.*, hal. 16.

³⁰ Kadira Pethiyagoda. 2013. "*The Influence of the Dominant Cultural Values on India's Foreign Policy*", Disertasi Ph.D Program di The University of Melbourne.

³¹ Deon Geldenhuys. 2012. "*Political Culture in South African Foreign Policy*". *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 2 No. 18, hal. 29-38.

³² Fore Liland. 1993. *Culture and Foreign Policy: An Introduction to Approaches and Theory*. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.

Kulturologi International

Yu Xintian, Direktur *Shanghai Institute for International Studies*, menyebut munculnya kulturologi internasional (*international culturology*) sebagai penelitian budaya dalam hubungan internasional. Pada tingkat akademis, kulturologi internasional adalah sub-bidang dari studi HI yang memberikan perhatian besar pada faktor budaya dalam penelitian masalah-masalah internasional. Kulturologi internasional berusaha menggabungkan secara lebih erat antara teori-teori HI dengan teori-teori budaya. Tujuan dari kulturologi internasional adalah mengakui kebudayaan sebagai variabel penting dalam hubungan internasional, dan membuat penelitian mengenai status, peranan, dan pengaruh budaya dalam hubungan internasional. Pentingnya penekanan pada aspek budaya dikarenakan banyak fenomena internasional yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan menggunakan sudut pandang geopolitik dan geoekonomi. Melalui teori-teori kulturologi, para penstudi HI diharapkan setidaknya menjadi lebih kondusif dalam memahami kompleksitas hubungan internasional melalui perkembangan atau dinamika dalam kebudayaan dan hubungan-hubungan lintas budaya.³³

Untuk memenuhi tugas di atas, masalah pertama adalah apakah perlu untuk memapankan (*to establish*) subdisiplin tersebut. Sebagai contoh, konstruktivisme Alexander Wendt telah memberikan banyak penekanan pada peran kebudayaan, mempertahankan bahwa struktur internasional lebih bersifat sosial daripada fenomena material. Karena dasar sosialitas adalah pengetahuan bersama (*shared knowledge*), pemikiran Wendt mengarah pada pandangan struktur kaum idealis sebagai sebuah “distribusi pengetahuan”. Konklusi alamiah Wendt adalah bahwa kebudayaan bukan sebuah sektor atau wilayah dari masyarakat yang berbeda dari ekonomi dan politik, namun kebudayaan hadir di manapun pengetahuan bersama ditemukan.³⁴

Yu Xintian mengatakan bahwa kebudayaan memiliki keunikan dan karakter independen. Bahkan dalam penelitian bidang ilmu-ilmu sosial perhatian penuh telah diberikan keunikan kebudayaan dan dengan demikian studi budaya telah terbentuk. Menegasikan keunikan dan karakter independen dari kebudayaan dengan alasan luasnya konsep ini jelas akan merusak wawasan kita mengenai segala hal, termasuk wawasan tentang hubungan internasional. Saat ini penting untuk memberikan penekanan pada kebudayaan ketika dampaknya terhadap hubungan internasional sedang meningkat.³⁵

³³ Yu Xintian, *ibid.*, hal. 13.

³⁴ Alexander Wendt, *loc. cit.*, hal. 181.

³⁵ Yu Xintian, *ibid.*, hal 19-20.

Studi HI di masa lalu telah menunjukkan bahwa sistem global atau tatanan global sebenarnya berpusat di negara-negara maju (Barat). Dalam bangunan budaya sistem dunia modern hampir tidak ada peran bagi kebudayaan Islam, India, dan China. Ini bertolak belakang dengan realitas. Ekspansi dari sistem dunia dalam bidang politik dan ekonomi belum membuat ekspansi budaya dunia mencapai level yang memadai. Semua pemain di arena dunia tidak memiliki prasyarat yang sama. Sebab itu eksplanasi kehadiran universal dari negara-negara utama di dunia modern tidak dapat dihubungkan hanya dengan perkembangan dan ekspansi kapitalisme, tetapi juga harus dikaitkan dengan budaya politik global dalam bentuk akhirnya.

Negara-negara tidak hanya akan menangani urusan-urusan internal, tetapi juga akan berhadapan dengan “masalah identitas” dan menciptakan “high culture”. Jika mereka tidak bisa masuk ke dalam proses penciptaan ini adalah mustahil untuk dibangun menjadi negara modern. Di satu sisi, setiap negara sekarang ini terhubung dengan sistem global dan pentingnya keterhubungan itu terus meningkat. Di sisi lain, bagaimana negara terhubung dengan seluruh dunia serta bagaimana mendefinisikan status dan kepentingan di dunia telah memicu perdebatan di dalam negeri, yang dapat menyebabkan berbagai gerakan politik, ideologi, dan keagamaan. Sebagaimana dikatakan Roland Robertson, politik internasional adalah budaya dan kita berada dalam periode politik budaya berlingkup global.³⁶

Kesimpulan

Isi penelitian dalam bidang kulturologi internasional sangat luas dan kaya. Singkatnya, kulturologi internasional dapat menjelaskan bagaimana faktor kebudayaan menentukan politik luar negeri dan sikap aktor-aktor internasional. Seperti diketahui, ada banyak aktor atau pemain dalam komunitas global, dan negara masih merupakan aktor yang paling fundamental dan paling penting. Kebijakan dalam dan luar negeri negara-negara semakin tergantung pada kehendak rakyat (*popular will*), pertentangan antara kelompok-kelompok kepentingan dan bekerjanya sistem, pada akhirnya ditentukan oleh kebudayaan politik dan nilai-nilai budaya. Sementara itu, perusahaan-perusahaan transnasional, organisasi-organisasi internasional, dan berbagai jenis NGO juga memainkan peran yang semakin meningkat sebagai aktor internasional. Kebijakan dan sikap-sikap dari aktor-aktor

³⁶ Roland Robertson. 2000. *Globalization: Social Theory and Global Culture*. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, hal. 7.

non-negara ini dalam komunitas global juga tidak dapat dipisahkan dari konteks nilai-nilai budaya tertentu.³⁷

Penelitian kulturologi internasional sangat berguna untuk menjelajahi bagaimana nilai-nilai budaya memberikan dampak pada sikap rakyat dan elit terhadap dunia luar, serta pada pembuatan kebijakan luar negeri negara-negara. Memang sikap terhadap budaya merupakan faktor yang sangat subyektif dan seringkali dianggap tidak memiliki standar penilaian obyektif sebagaimana menjadi tuntutan sebuah ilmu pengetahuan (sains). Namun dengan serangkaian kegagalan positivisme dan paradigma saintifik di masa lalu, studi HI pasca Perang Dingin mencoba menempuh sejumlah pendekatan alternatif yang diharapkan dapat lebih mengungkap realitas yang berkembang dalam masyarakat global. Kulturologi internasional atau pendekatan kebudayaan adalah salah satu dari pendekatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, Nancy J. 2008. *International Dimensions of Organizational Behavior*. USA: Thomson Learning, Inc.
- Chay, Jongsuk. 2016. Sebagaimana dikutip Mary Einbinder, "Cultural Diplomacy: Harmonizing International Relations through Music", dalam <http://www.culturaldiplomacy.org/pdf/case-studies/> [Diakses 24 Oktober 2016].
- Dellios, Rosita, dan James Ferguson. 1997. "Australia and ASEAN: Submission to the Foreign Affairs Subcommittee". *ASEAN Enquiry*, Vol. 1, hal. 95-121.
- Diez, Thomas, Ingvild Bode, and Aleksandra Fernandes da Costa. 2011. *Key Concepts in International Relations*. London: SAGE Publication Ltd.
- Ferrante, Joan. 2008. *Sociology: A Global Perspectives*. USA: Thomson Wadsworth.
- Ferguson, James. 2016. "The Controversial Role of Culture in International Relations", dalam <http://www.international-relations.com/wbadvir/wbadvir4.htm> [Diakses 7 Oktober 2016].
- Geldenhuis, Deon. 2012. "Political Culture in South African Foreign Policy". *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 2 No. 18, hal. 29-38.
- Hall, Stuart (ed.). 2003. *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London: SAGE Publications.
- Hudson, Valerie M. 1997. *Culture and Foreign Policy*. Boulder: Lynne Rienner.

³⁷ Yu Xintian, *Ibid.*, hal. 21-22.

- Huntington, Samuel P. 1997. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New Delhi: Penguin Books.
- Iriye, Akira. 1997. *Cultural Internationalism and World Order*. New York: John Hopkins University Press.
- Knick, Stanley. 2016. "Traditional Culture and Modern Culture: Man's Fall From Grace", dalam http://www.huffingtonpost.com/stanley-knick/traditional-culture-and-m_b_655992.html [Diakses 5 Oktober 2016].
- Levi-Strauss, Claude. 2009. Sebagaimana dikutip David Simo, "Modern and Traditional Cultures", dalam Herbert Arlt dan Donald G. Daviau (eds.), *Culture, Civilization, and Human Society*. Oxford: Eolss Publishers Co., Ltd.
- Liland, Fore. 1993. *Culture and Foreign Policy: An Introduction to Approaches and Theory*. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.
- Newman, David M. 2010. *Sociology: Exploring the Architecture of Everyday Life*. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.
- Nye, Joseph. 1992. *Bound to Lead: The Changing Nature of American Power*. New York: Military Transition Press.
- Pethiyagoda, Kadira. 2013. "The Influence of the Dominant Cultural Values on India's Foreign Policy", Disertasi Ph.D Program di The University of Melbourne.
- Robertson, Roland. 2000. *Globalization: Social Theory and Global Culture*. Shanghai: Shanghai People's Publishing House.
- Spencer-Oatey, Helen. 2016. "What is Culture?", dalam <https://www2.warwick.ac.uk/globalpadintercultural> [Diakses 4 Oktober 2016].
- Spradley, James P. 1972. *Culture and Cognition: Rules, Maps, and Plans*. San Marcos, PI: Chandler Pub. Co.
- Suparlan, Parsudi. 2004. *Hubungan Antar Suku-Bangsa*. Jakarta: YPKIP.
- Tyler, Edward B. 2013. Sebagaimana dikutip Roy Ellen, Stephen J. Lycett, dan Sarah E. Johns (eds.). *Understanding Cultural Transmission in Anthropology: A Critical Synthesis*. London: Berghanh Books.
- Wendt, Alexander. 1999. *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Yu Xintian. 2004. *Cultural Factors in International Relations*. Shanghai: Shanghai Institute of International Studies.
- Yu Xintian. 2004. "Combining Research on Cultural Theory and International Relations", dalam Yu Xiantian (ed.), *Cultural Factors in International Relations*. Washington, DC: Cardinal Station.

Zhang Hongyan. 1993. *Ethnic and Culture Prejudice: New Views on Comparison between Chinese and Western Cultures*. Liaoning: Liaoning Education Publishing House

Zhu Majie. 2002. "The Role of Soft Power in International Relations", dalam Yu Xiantian, *Cultural Impact on International Relations*. Washington, DC: The Council for Research in Values and Philosophy.

Zhu Majie. 2002. "Contemporary Culture and International Relations", dalam Yu Xiantian, *Cultural Impact on International Relations*. Washington, DC: The Council for Research in Values and Philosophy.